

Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

RICHARD D.E GAGHAUNA¹, DAVID P.E SAERANG², JESSY D.L WARONGAN³

¹²³Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Email: richard.gaghauna@gmail.com¹, dpesaerang@gmail.com², jdimarcus@gmail.com³

Abstract. *This research is aimed to understand the obstacles of disbursing capital expenditures in Talaud local government and strategies to overcome such problems. This is an exploratory qualitative research. The sampling method is purposive sampling. Data were collected by in-depth interviews and documentation studies. This study concludes that there are several obstacles in the capital expenditures obstacles within: (a) the stage of budget planning, (b) capital expenditure disbursement and (c) in the responsibility stage. The main factors causing those obstacles are the low quality of the human resources, lack of knowledges in performing their tasks and functions as the officers and providers to supplies, budget limitation, and lack of commitment of the district head, insufficient of continuous and periodic supervision. There are 4 types of strategy implemented to overcome the obstacles in relation to SWOT: (1) SO (strengths-opportunities) strategies are used to overcome the low quality of the human resources and commitment of the district head, (2) WO (weaknesses-opportunities) strategies are employed to overcome budget limitation, (3) ST (strength-threats) strategies are conducted to resolve continuous and periodic supervision and evaluation for improvement, (4) WT (weakness-threats) strategies are implemented to solve insufficient knowledge knowledges in performing their tasks and functions as the officers and providers to supplies.*

Keywords: *Capital expenditure, Planning, Capital expenditure execution, monitoring.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala atau penghambat pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan bagaimana strategi mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif (*exploratory approach*). Teknik sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Disimpulkan bahwa kendala dibagi menjadi (a) kendala Perencanaan anggaran, (b) pelaksanaan belanja modal dan (c) pertanggungjawaban. Faktor-faktor utama pendukung kendala adalah kendala rendahnya kualitas SDM, kendala kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, kendala ketersediaan anggaran dan kendala komitmen pimpinan daerah, kendala pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Strategi yang diformulasikan adalah dengan menggunakan *matrix SWOT*, ditemukan 4 jenis strategi: (1) Strategi SO (*strengths-opportunities*) untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM dan komitmen pimpinan daerah, (2) Strategi WO (*weaknesses-opportunities*) digunakan untuk Untuk mengatasi kendala ketersediaan anggaran kendala, (3) Strategi Strategi ST (*strength-threats*) untuk mengatasi kendala pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus, (4) Strategi WT (*weakness-threats*) untuk mengatasi kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa.

Kata Kunci: Belanja modal, Perencanaan, Pelaksanaan belanja modal, Pengawasan.

1. Pendahuluan

Dalam pidato Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 06 April 2017 yang dipublikasikan melalui website Kementerian Keuangan RI menegaskan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, untuk melakukan penghematan dan menggeser belanja pegawai dan belanja barang untuk masuk ke dalam belanja modal. Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.03 PSAP 02 Halaman 8 Baris 5 Paragraf 37 didefinisikan sebagai pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud”.

Pengelolaan belanja modal di Kabupaten Kepulauan Talaud belum memenuhi nilai kepatuhan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai temuan berulang atas audit belanja modal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara, selang Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015. Pertama, temuan hasil pekerjaan realisasi belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan belum dipertanggungjawabkan pada T.A 2013, 2014 dan 2015. Kedua, temuan kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pada T.A 2013, 2014 dan 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk menganalisis apa yang menjadi penghambat pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, (2) Untuk menganalisis strategi mengatasi penghambat belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif (*exploratory approach*). Teknik sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan langkah yaitu: (1) Membuat transkrip wawancara (*interviews transcriptions*), (2) Melakukan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didahului dengan melakukan *coding* terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan yang paling banyak muncul dalam transkrip wawancara (*interviews transcriptions*). Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap *coding* yang telah dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk membangun kategori dari sesetiap klasifikasi. Satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi wawancara itu dengan melihat kesesuaian antara konsep yang telah dibuat dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Setelah dikategorikan, maka dimasukkan ke dalam tema, (3) Melakukan validasi data pengujian keabsahan data dengan Metode Uji *Credibility* (Validitas Internal) dan Uji *Dependability* (Reliabilitas), (4) Membuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diuji keabsahannya.

3. Pembahasan

3.1 Kendala Pelaksanaan belanja modal

Tahapan pelaksanaan belanja modal sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 yang telah diubah oleh Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 3. Dapat di klasifikasikan menjadi tiga tahap yaitu: (1) Perencanaan.

(2)Pelaksanaan. (3) Pertanggungjawaban. Sehingga akan dibahas kendala dalam tiga tahapan kegiatan ini.

3.1.1 Kendala Perencanaan Belanja Modal

3.1.1.1 Perencanaan anggaran kegiatan tidak cermat dan di intervensi

Perencanaan belanja modal di Kabupaten Kepulauan Talaud, direncanakan tidak cermat dan di intervensi, kegiatan cenderung dialokasikan dengan perhitungan tidak matang. Menyebabkan kegiatan harus mengalami penyesuaian anggaran dan desain yang memakan waktu sehingga tidak sesuai lagi dengan RKPD SKPD serta program kegiatan usulan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Soekanto (2009:28-30) menyebutkan bahwa peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Tiap pelaku dari baik dari PEMDA/SKPD, dewan tidak melakukan peran mereka. Dewan cenderung menggunakan posisi mereka sebagai alat negosiasi atas agenda-agenda mereka, sementara PEMDA/SKPD tidak menggunakan peran mereka untuk menyampaikan agenda-agenda mereka dan hanya cenderung menyetujui apa pun yang di sampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam situasi seperti inilah, dibutuhkan peran dari para manajer yang merupakan PA pada SKPD-SKPD untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan perencanaan anggaran kegiatan.

3.1.1.2 Pengguna Anggaran tidak paham tugas yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres)

Surat kepala LKPP no. 76/ KA/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang kewajiban mengumumkan RUP T.A 2015 dengan menggunakan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dalam Pasal 25 ayat 3 Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa dasar dari proses pengadaan/pelelangan adalah RUP yang telah di *upload* ke dalam sistem RUP Online (SiRUP) yang menjadi acuan dalam proses pelelangan. Kesalahan entri RUP merupakan penghambat proses lelang karena proses lelang tidak dapat dilakukan jika RUP belum di perbaiki.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi membutuhkan peran para manajer. Soekanto (2009:28-30) menyebutkan bahwa peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai manajer di dalam organisasinya dengan tujuan untuk mengefektifkan serta mengefisienkan organisasi yang ia pimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Jika seorang manajer tidak paham tugas dan fungsinya tentunya ia tidak dapat mengefektifkan serta mengefisienkan organisasi yang dipimpin. Oleh karena itu, penting tentunya bagi seorang manajer agar dapat mengerti tugas dan fungsinya sehingga ia dapat mengefektifkan serta mengefisienkan organisasi atau dinasny.

3.1.1.3 Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri tidak dilakukan dengan hasil survei harga pasar sesuai dengan pada Perpres No.70 Tahun 2012

Ketentuan Perpres No. 70 tahun 2012 sebagaimana telah di rubah menjadi Perpres No.4 Tahun 2015 pada pasal 66 ayat 7 huruf a sampai dengan huruf j, dijelaskan proses dan acuan harga pada pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS tidak disusun berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Daerah (PEMDA), tetapi dengan survei harga pasar atau membandingkan harga kontrak sejenis. Batasan harga digunakan adalah standar satuan harga PEMDA sebagai batasan tertinggi bukan standar harga PEMDA sebagai acuan dalam menyusun HPS. Dengan menggunakan SSH PEMDA, akan terjadi selisih dengan harga pasar setempat karena SSH PEMDA adalah harga tertinggi di kabupaten.

Bahwa hendaknya tiap personel suatu organisasi dinilai memiliki kemampuan dan *skill* sehingga dapat dibuat gambaran dasar kemampuan yang tentunya merupakan gambaran kemampuan organisasinya. Apabila diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasinya, maka perlu dilakukan investasi pada personel untuk meningkatkan kemampuan yang tentunya akan meningkatkan kemampuan organisasi Armstrong dan Taylor (2014:68).

3.1.1.4 Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah.

Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah, sulit membedakan belanja modal dan barang jasa. Diperburuk dengan banyaknya SDM perencanaan belum memahami konsep dasar belanja modal dan barang jasa. Pemahaman yang ada, adalah bila kegiatan itu membangun infrastruktur maka belanja itu adalah belanja modal. Armstrong dan Taylor (2014:68) berpendapat pengukuran *skill* dan kemampuan personel akan menyediakan para manajer dasar dalam pengambilan keputusan penempatan personel pada posisi-posisi tertentu. Dengan mengenali pentingnya kemampuan untuk dapat mengukur kemampuan tiap personel hendaknya dapat diciptakan suatu metode pengembangan personel sehingga dapat dicapai kelebihan dalam manusia modal (*human capital*). Pemahaman SDM Perencana yang tidak selaras akan diperburuk apabila pemahaman kepala dinas pun tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas selaku pimpinan unit harusnya berperan sebagai manajer yang memastikan organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menyelaraskan pemahaman SDM Perencana di SKPD.

3.1.1.5 Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal

Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 29% seperti diamanatkan dalam Permendagri panduan penyusunan APBD karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. Menunjuk Lampiran I bagian III Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD,

bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 29% dari total belanja daerah.

Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Maka dengan tidak mengikuti ketentuan penganggaran yang ada artinya PEMDA Talaud tidak mendukung pembangunan nasional serta akan juga menghambat kemajuan daerah sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Sandri *et al* (2016), bahwa alokasi belanja modal yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pelayanan publik.

3.1.2 Kendala Pelaksanaan Belanja Modal

3.1.2.1 Tim PHO yang tidak memeriksa kegiatan secara detail.

Tim PHO ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf e, bahwa tim PHO adalah harus memiliki kualifikasi teknis yang memadai dan memahami kontrak. Tim PHO bertugas memeriksa kegiatan secara detail dengan membandingkan volume pekerjaan di lapangan terhadap Kontrak dan CCO/ Add perubahan jika ada. Anggota tim PHO ini dipilih dengan pertimbangan untuk kemudahan koordinasi dan pengalaman akibat kekurangan personel berkompeten sehingga kegiatan tidak dapat diperiksa secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Little John dan Foss (2008:75-76) organisasi mengakumulasi dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi. Berdasarkan teori ini semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespons pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

Dalam hal ini, kemampuan tim PHO yang tidak memadai mengakibatkan aliran informasi yang ada tidak dapat disampaikan dengan baik dan menyebabkan tim PHO tidak dapat menjalankan peranannya sehingga kegiatan tidak diperiksa dengan detail dan menimbulkan temuan.

3.1.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi dan berkualifikasi sedikit

Menunjuk pada Perpres No. 70 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.04 tahun 2015 pasal 12 ayat 2 huruf g, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PPKom, harus memenuhi prasyarat sebagai berikut, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Sedikitnya jumlah ASN yang bersertifikasi dan memiliki kualifikasi dan pengetahuan baik secara teknis maupun administratif untuk dapat menjadi PPKom. Adanya kebiasaan saling melaporkan berita yang belum jelas kepada APH mengenai pelaksanaan kegiatan belanja modal, mengakibatkan PNS yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi pengadaan barang/jasa tidak bersedia jadi PPKom

Menurut Lane (2000:29) keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi khususnya ada pada manajemen, seperti fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi dan kontribusi dari para manajer yang dititik beratkan pada kepemimpinan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi membutuhkan peran dari para manajer pada peran eksekutifnya yang akan mengevaluasi pencapaian dengan perhatian khusus pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi dimaksud. Oleh karena itu kepala dinas sebagai pimpinan unit harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran, berperan sangat esensial dalam mengatasi keadaan ini.

3.1.2.3 Anggaran Perencanaan dan Pengawasan Belanja Modal yang belum Proporsional.

Memperhatikan tabel E1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Bangunan, bahwa anggaran perencanaan sebesar 3% dari anggaran fisik, dan anggaran pengawasan sebesar 2% dari anggaran fisik. Pada kenyataannya, target anggaran ini tidak tercapai sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Terlihat adanya perubahan

kebijakan yang lebih mementingkan jumlah paket belanja modal tanpa memperhatikan ketersediaannya anggaran untuk perencanaan dan pengawasan. Perubahan kebijakan ini menyebabkan nilai fisik pekerjaan bukan merupakan salah satu konsiderans dalam menganggarkan belanja perencanaan dan pengawasannya. Sehingga bisa saja terjadi pekerjaan dengan nilai fisik tinggi dengan yang nilai fisiknya rendah, keduanya memperoleh alokasi anggaran perencanaan dan pengawasan yang sama.

Menurut Little John dan Foss (2008:75-76) organisasi mengakumulasi dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi. Berdasarkan teori ini semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Informasi yang diterima oleh pengambil keputusan dalam penetapan anggaran perencanaan dan pengawasan kegiatan, tidak tepat. Informasi yang tidak tepat ini menyebabkan perubahan kebijakan yang tidak lagi mempertimbangkan nilai fisik pekerjaan sebagai pertimbangan menetapkan besaran anggaran perencanaan dan pengawasan.

3.1.2.4 Pejabat Pembuat Komitmen tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan beban kerja fungsional

Menunjuk Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a, Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Perpres No.4 Tahun 2015 menyebutkan secara eksplisit bahwa K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD yang meliputi honorarium personil organisasi Pengadaan barang dan jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek. Kenyataannya masih ada SKPD yang tidak menyediakan honorarium dan/atau telah menyediakan namun tidak memadai sesuai dengan standar ketentuan berlaku. Alasan utamanya, tidak adanya standarisasi besaran dan jumlah paket pekerjaan yang layak untuk diberikan honorarium oleh seorang PPkom atas paket pekerjaan yang dikelolanya. Menurut Lane (2000:29) keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi khususnya ada pada manajemen, seperti fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi dan kontribusi dari para manajer yang dititikberatkan pada kepemimpinan. Seorang PPkom adalah seorang manajer atas organisasi yang dipimpinnya, terdiri atas para pengelola belanja modal seperti PPTK, ASTEK, Direksi dan pengawas lapangan. Jika ia tidak diberikan kompensasi yang layak atas beban kerjanya tentunya ia tidak dapat mengelola organisasi secara efektif dan efisien.

3.1.2.5 Kontraktor yang kurang bonafide/tidak bermodal

Uang muka kegiatan dalam Perpres No. 70 tahun 2012 diatur dalam pasal 88. Uang muka hanya diberikan atas persetujuan PPkom yang berarti bahwa uang muka bukan merupakan hak dari pihak ketiga yang mengikat kontrak dengan pemerintah. Pada saat lelang panitia lelang telah memperhitungkan kemampuan finansial dari pihak ke tiga untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diatur dalam pasal 19 huruf j. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah termasuk kemampuan penyedia untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan peralatan dan keadaan finansial pihak ketiga. Banyak pihak ke tiga yang hanya menunggu pencairan uang muka kemudian memulai pekerjaan padahal saat di evaluasi penawaran paket berdasarkan data-data yang diberikan seharusnya pihak ke tiga dapat segera memulai pekerjaan tanpa menunggu uang muka. Penyedia-penyedia yang menunggu uang muka ini ternyata hanya meminjam perusahaan untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak didukung oleh kemampuan finansial yang baik.

Menurut Manurung (2013:34), ketika dua atau lebih individu akan mengikat kerja sama dalam suatu perjanjian dan salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain tentang perjanjian ini di mana karena pengetahuan ini dapat menyebabkan kerugian atau pun keuntungan. Ada dua bentuk dasar informasi asimetri yang dapat dibedakan. Yang pertama adalah Hidden Knowledge mengacu pada situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas (atau "tipe") dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. Yang kedua yakni Hidden Action adalah ketika salah satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain.

Dari keadaan di atas tampak bahwa informasi asimetri yang terjadi adalah *hidden knowledge*. Pihak ketiga sebagai pihak yang mengikat kontrak dengan PEMDA Talaud yang dengan sengaja tidak

memberikan semua informasi yang ada mengenai keberadaan sebelum mengikat kontrak dengan PEMDA Talaud.

3.1.2.6 Pemahaman yang tidak tepat soal penerapan denda keterlambatan.

Denda keterlambatan diatur dalam Perpres No. 70 tahun 2012 Pasal 120 di mana denda keterlambatan adalah 1/000 per hari keterlambatan dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak. Nilai denda tersebut adalah nilai mutlak dan penjabarannya di atur dalam syarat-syarat khusus kontrak yang disepakati oleh kedua pihak. Menurut Tandiontong (2016:9) teori kontrak pada prinsipnya mempelajari tentang bagaimana pelaku ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efisien/optimal, umumnya dalam keadaan ketidakpastian dan adanya informasi yang asimetri (Laffont dan Tirole, 1993) dalam Tandiontong. Ketidakpastian muncul karena para pihak tidak dapat sepenuhnya memprediksi dan menuangkan ke dalam kontrak apa yang akan terjadi selama periode kontrak berlangsung. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara kedua pihak tersebut.

Pada dasarnya semua kontrak pengadaan adalah kontrak tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini diakibatkan oleh pertimbangan biaya yang mahal untuk dapat membuat kontrak yang lengkap karena *information cost*. Tetapi dengan menggunakan SBD ini tentunya *information cost* dapat ditekan sehingga kontrak-kontrak yang ada dapat menjadi kontrak lengkap, dan dengan kontrak yang lengkap maka hak dan kewajiban pemerintah dan pihak ketiga tentunya dapat terakomodir dengan baik.

3.1.2.7 Pembagian tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari SKPD belum jelas

Kurang jelasnya pembagian porsi tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari SKPD dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tepat Menurut Tandiontong (2016:9) kejadian tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara kedua pihak tersebut. Pada dasarnya semua kontrak pengadaan adalah kontrak tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini diakibatkan oleh pertimbangan biaya yang mahal untuk dapat membuat kontrak yang lengkap karena *information cost*. Tetapi dengan menggunakan SBD, *information cost* dapat ditekan sehingga pelaksanaan kontrak, dapat dilaksanakan dengan baik karena hak dan kewajiban pemerintah dan pihak ketiga tentunya dapat terakomodir dengan baik dan masing-masing memahami batasan-batasan hak dan kewajibannya.

Selanjutnya peran PPKom harus efektif dan efisien dalam memastikan dan menjaga organisasi pengadaan yang dikelolanya, guna mencapai tujuannya, seperti yang diungkapkan oleh Lane (2000:29) keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi khususnya ada pada manajemen, seperti fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi dan kontribusi dari para manajer yang dititik beratkan pada kepemimpinan.

3.1.3 Kendala Pertanggung jawaban Belanja Modal

3.1.3.1 Kendala di kuantitas personel pengawas internal

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang berfungsi sebagai penggerak organisasi, baik itu di dalam perusahaan ataupun institusi yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih serta dikembangkan. SDM yang berkualifikasi teknik di inspektorat Kabupaten kepulauan Talaud terbatas

Menurut Armstrong dan Taylor (2014:68) anggota suatu organisasi mengontribusikan pengetahuan mereka dan kemampuan untuk mengembangkan organisasi tersebut atau suatu kemampuan yang terdiri atas pengetahuan atas kemampuan serta *skill* tiap anggota dari organisasi, serta berapa besar kontribusi mereka terhadap pengembangan organisasi. Investasi ke pegawai akan meningkatkan nilai mereka bagi organisasi yang akan meningkatkan daya saing dari organisasi mereka. Sehingga perlu dikaji langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Supaya Inspektorat dapat berfungsi dengan baik dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan belanja modal dan harus didukung dengan sumber daya manusia dan sumber pendanaan yang memadai, guna melaksanakan fungsi tersebut.

3.1.3.2 Keterbatasan Alokasi Anggaran Pengawasan

Kesulitan untuk mencapai ketentuan ini karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. Pada T.A 2015 dari total belanja PEMDA 51.47% diserap pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD sehingga Inspektorat selaku Pengawas Internal, tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sebagai akibat dari keterbatasan anggaran. Akibat lemahnya pengawasan internal ini, terdapat temuan belanja modal yang tidak dapat dikendalikan.

3.1.3.3 Pihak ketiga/penyedia jasa yang memiliki temuan kurang kooperatif

Kontrak pada prinsipnya adalah kesepakatan pelaku ekonomi yang efisien dan optimal yang mengikat dua pihak di dalam suatu kesepakatan bersama dimana hak dan kewajiban masing-masing adalah jelas. Jika membicarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka kesepakatan dibuat antara Pemerintah diwakili oleh PPKom dengan Pihak ketiga/penyedia. Masing-masing pihak hendaknya mematuhi kesepakatan yang ada termasuk jika terjadi temuan atas pekerjaan. Tetapi pada kenyataan, pihak inspektorat selaku koordinator dari tindak lanjut temuan mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti temuan yang ada.

Menurut Manurung (2013:34), ketika dua atau lebih individu akan mengikat kerja sama dalam suatu perjanjian dan salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain tentang perjanjian ini dan dimana karena pengetahuan ini dapat menyebabkan kerugian atau pun keuntungan pada salah satu pihak telah terjadi informasi asimetri dalam bentuk *hidden action*.

3.1.3.4 Item-item kontrak tidak disebutkan mereknya.

Seperti yang disampaikan Laffont dan Tirole (1993) dalam Tandiontong (2016:9), pelaku ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efisien/optimal, umumnya dalam keadaan ketidakpastian dan adanya informasi yang asimetri. Ketidakpastian muncul karena para pihak tidak dapat sepenuhnya memprediksi dan menuangkan ke dalam kontrak apa yang akan terjadi selama periode kontrak berlangsung. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara kedua pihak tersebut. Jika kita telah berbicara kontrak harusnya kontrak itu dapat terukur dan jelas. Terutama untuk kontrak belanja modal infrastruktur yang kompleks seperti bangunan dimana ada item-item kecil seperti kunci pintu, keramik, plafon, instalasi. Sehingga memudahkan proses audit untuk membandingkan antara realisasi dengan kontrak yang ada.

3.2 Strategi mengatasi kendala pelaksanaan belanja modal

Formulasi strategi untuk mengatasi kendala pelaksanaan belanja modal. Menurut David (2011:178), *Matrix Strength, weaknesses, opportunities, threats* adalah alat yang tepat untuk membantu para manajer untuk mengembangkan empat tipe strategi: strategi SO (*strengths-opportunities*), strategi WO (*weaknesses-opportunities*), strategi ST (*strength-threats*) dan strategi WT (*weaknesses-threats*). Bagian yang paling sulit dari pengembangan *Matrix SWOT* adalah mencocokkan/menemukan faktor kunci internal dan eksternal. Dibutuhkan penilaian yang baik untuk menemukan komponen yang cocok. Langkah pertama dimulai dengan menemukan segala faktor internal dan eksternal yang akan ditampilkan dalam *Matrix SWOT*.

Kekuatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat PEMDA untuk berkomitmen melaksanakan belanja modal dengan baik. 2. Barisan anak-anak muda yang bersemangat. 3. Sumber daya manusia yang banyak serta Aparat Sipil Negara tugas belajar yang banyak. 4. Kepala daerah dengan prioritas belanja APBD infrastruktur yang besar dan gemar membangun. 	Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang fokus. 2. Intervensi dalam pelaksanaan belanja modal. 3. Pola pikir membangun belum terbentuk. 4. Anggaran perencanaan dan pengawasan belum proporsional. 5. Mentalitas cepat puas. 6. Tradisi saling lapor melapor.
Kesempatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan SDM Oleh BPKP. 2. Program pembangunan nasional dari pesisir. 3. Program Tol Laut. 	Ancaman: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis dan cuaca yang Ekstrem. 2. Lokasi yang terisolir/Jauh 271 mil dari Manado.

3.2.1 Strategi S-O (strengths-opportunities)

Untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM dan komitmen pimpinan daerah

1. Meningkatkan minat PNS untuk mengembangkan kapabilitas dan kompetensi diri dengan Beasiswa baik dari daerah maupun dari luar daerah serta PKS (Pelatihan kantor sendiri) dan segala jenis pelatihan/bimbingan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan PNS Khususnya pengelola belanja modal infrastruktur.
3. Memperlancar komunikasi dan koordinasi daerah dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat dan satuan kerja vertikal yang ada di daerah.
4. Meningkatkan anggaran Inspektorat dan SDM nya baik kualitas maupun kuantitas.

3.2.2 Strategi W-O (weaknesses-opportunities)

Untuk mengatasi faktor penghambat ketersediaan anggaran

1. Menjabarkan/merevisi RPJMD dengan tujuan-tujuan yang jelas dengan cara pencapaian yang dipahami oleh semua SKPD yang terlibat.
2. Meningkatkan peran anggota dewan dalam Musrembang sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat yang lebih baik.
3. Memperlancar komunikasi dan koordinasi daerah dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat dan satuan kerja vertikal yang ada di daerah.
4. Membuat standar harga perhitungan konsultan perencanaan dan pengawasan yang lebih jelas dengan panduan peraturan-peraturan yang ada dan disahkan dengan paling tidak SK bupati.
5. Meningkatkan semangat PNS untuk mengembangkan Kapabilitas dan kompetensi diri di bidang Teknik dan manajemen pemerintah.

3.2.3 Strategi S-T (strength-threats)

Untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus

1. Meningkatkan transparansi setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dengan menggandeng masyarakat setempat dalam pengawasan.
2. Membuat sistem reward atas tiap pencapaian-pencapaian PNS atau warga dalam pelaksanaan pembangunan di talaud.
3. Meningkatkan semangat PNS untuk mengembangkan Kapabilitas dan kompetensi diri di bidang Teknik dan manajemen pemerintah.
4. Membuat sistem perencanaan anggaran dan kegiatan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang terjadi.

3.2.4 Strategi W-T (weakness-threats)

Untuk mengatasi Kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa

1. Mensosialisasikan RPJMD PEMDA agar dapat dimengerti oleh setiap PNS.
2. Melaksanakan agenda seting yang baik saat musrembang dilaksanakan.
3. Meningkatkan transparansi dan sosialisasi pelaksanaan belanja modal ke masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas SDM PNS yang ada dengan berbagai cara yang praktis dan tepat guna.
5. Orientasi anggaran tidak hanya pada belanja modal tetapi juga mempertimbangkan perencanaan dan pengawasannya.
6. Perencanaan kegiatan telah mengantisipasi kondisi geografis dan kendala cuaca yang ada.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini, terdapat 2 (dua) kesimpulan yang diperoleh, yakni sebagai berikut:

1. Kendala pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:
 - (1) Kendala perencanaan anggaran, yang meliputi:
 - a. Perencanaan anggaran kegiatan tidak cermat dan intervensi di dalam perencanaan anggaran.
 - b. PA tidak paham tugas yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Pembuatan HPS tidak dilakukan dengan hasil survei harga pasar sesuai dengan pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah.
 - e. Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 29%.
 - (2) Kendala pelaksanaan belanja modal, yang meliputi:
 - a. Tim PHO yang tidak memeriksa kegiatan secara detail.
 - b. Jumlah ASN yang bersertifikasi dan memiliki kualifikasi dan pengetahuan sedikit.
 - c. Anggaran perencanaan dan pengawasan belanja modal yang belum proporsional.
 - d. PPKom tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan beban kerja fungsional.
 - e. Kontraktor yang kurang bonafide/tidak bermodal.
 - f. Pemahaman yang tidak tepat soal penerapan denda keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - g. Pembagian porsi tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari SKPD.
 - (3) Kendala pertanggungjawaban belanja modal, yang meliputi:
 - a. Kendala di kuantitas personel pengawas internal.
 - b. Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengawasan.
 - c. Pihak ketiga/penyedia jasa yang memiliki temuan kurang kooperatif.
 - d. Item-item kontrak tidak disebutkan mereknya.
- Dari ketiga kendala perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja modal dan pertanggungjawaban belanja modal disebabkan oleh 5 (lima) faktor utama, yakni:
1. Kendala rendahnya kualitas SDM.
 2. Kendala kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa.
 3. Kendala ketersediaan anggaran.
 4. Kendala komitmen pimpinan daerah.
 5. Kendala pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

2. Strategi mengatasi faktor penghambat belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni:
 - (1) Untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM, menggunakan strategi S-O (*strengths-opportunities*)
 - (2) Untuk mengatasi Kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, menggunakan Strategi W-T (*weakness-threats*)
 - (3) Untuk mengatasi faktor penghambat ketersediaan anggaran, menggunakan Strategi W-O (*weaknesses-opportunities*)
 - (4) Untuk mengatasi faktor penghambat komitmen pimpinan daerah, menggunakan strategi S-O (*strengths-opportunities*)

- (5) Untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus, menggunakan Strategi S-T (*strength-threats*).

4.2 Saran

- 1) PEMDA wajib menyelenggarakan bimbingan teknis/sosialisasi/*workshop/tutorial* tentang peraturan perundang-undangan guna peningkatan kompetensi pengelolaan belanja modal, belanja barang/jasa.
- 2) Setiap unit pelaksana dan pengelola kegiatan wajib memahami tugas pokok dan fungsi mempedomani Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Setiap SKPD mengusulkan program kegiatan prioritas dan mendesak dengan perhitungan teknis alokasi anggaran yang tepat, efektif, realistis transparan dan akuntabel kepada TAPD mempedomani Peraturan Bupati.
- 4) Pengelolaan APBD yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban wajib dilaksanakan secara konsisten dengan merujuk pada dokumen perencanaan daerah (RKPD dan Renstra).

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A Elder Randal J, Beasley Mark S. 2015. *Auditing and assurance services an integrated approach*. Pearson. ISBN 13: 978-0-13-312563-4
- Armstrong, Michael, Stephen Taylor. *Armstrong's Handbook of Human Resources Management Practice 13th Edition*. Ashford Colour press Ltd. ISBN 978-0-7494-6964-1
- Anjani, Eka sintala dewi, Akram, Lilik Anjani. 2013. Faktor Penentu Belanja Modal Dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Infestasi* Vol 11 No.1. 2015 Hal.1- 25
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Bashir Olayinka Kolawole dan Sunkanmi Ayoola Odubunmi 2015. Government Capital Expenditure, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Relationship in Nigeria. *Journal of Educational and Social Research*. Vol. 4 No.5 July 2014. ISSN 2239-978X Page 444-453
- Besley, Scott dan. Brigham, Eugene F. 2008. *Essential of Managerial Finance. Fourteen Edition*. New jersey: prentices Hall.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. ISBN 978-979-769-503-3
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social science research: Principles, methods, and practices*. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike ISBN-13: 978-1475146127
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian kualitatif & desain riset Edisi ke 3*. Pustaka Pelajar ISBN :978-602-229-358-3
- Darsono, I.L. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1(8): Hal.11-21.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT Indeks, Jakarta
- David, Fred R. 2011. *Strategic management concepts and case 13th edition*. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Danial, Hariyati K. 2014. Analisis Belanja Modal Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 850-858
- Desak, Nyoman Yulia dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14.3 (2016) ISSN: 2302-8559 Hal. 1924-1950
- Falade, Olanipekun Emmanuel dan Olagbaju Ifeolu Oladiran. 2015. *Effects of governments capital expenditure on manufacturing sector output in Nigeria*. Bussines and economic research 2015 Vol 5 No. 2 ISSN 2162-4860 Page 136-152
- Guzmana, Jorge Luis. 2016. *The Impact of Capital Expenditure on the Probability of Reelection of Mayors at the District Level in Peru*. JEL, 3(1), J.L. Guzman, Page.112-140

- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Kadarisman, Muhamad. 2012. Manajemen Kompensasi. Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup)
- Jannah, Roihatul .2013. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015). WARTA EKONOMI VOL. 07 NO 17 Februari 2017 hal. 123-131
- Jensen M, and Smith C. 1984. *Stockholder, Manager and Credit Interest; Applications of Agency Theory in Altman and Subrahmanyam, Eds Recent Advances in Corporate Finance*. Home Word. Richard Irwin.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *New Public Manajemen. Routledge11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE*
- Lestari, Anita. 2016. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan kemandirian keuangan Daerah provinsi sulawesi tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN: 2502-5171 Hal. 44-55
- Littlejohn, Stephen W, Karen A. Foss. 2008. *The Theories of Human Communication. Ninth Edition*. Thomson Wadsworth.
- Rochmatullah, Mahameru Rosy, Rudy hartono dan Atwal Arifin.2016. *Determinating the value of Capital expenditure allocation in indonesia local government*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17 (2), December 2016,152-166 Jurnal Ekonomi Pembangunan, ISSN 1411-6081 Hal.152-166
- Marlina, Lilis, Mirna Indriani dan Heru Fahlevi.2017. Kinerja Keuangan Dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164 Hal. 21-30
- Munawar, Nadirsyah, Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini atas laporan keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Vol 5. No.2, Mei 2016 ISSN 2302-0164 Hal. 57-67
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmentalrevenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015). KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 Hal. 57-66
- Nurhidayati, Lufki Laila dan rizal yaya .2013. Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: Praktik di pemerintah daerah. JAAI Vol 17 No.2 Desember 2013 Hal.102-114
- Njoku, A.C, Okezie A. Ihugba, Idika, Ngozi. 2014. *Is Government Capital Expenditure Productive? Evidence from Nigerian Manufacturing Sector (1971-2012)*. Journal of Educational and Social Research. Vol. 4 No.5 July 2014 ISSN 2239-978X Page 143-154
- Pattanayak, Sailendra. 2016. Expenditure Control: Key Features, Stages, and Actors, Fiscal Affairs Department.IMF
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sandri, Ni Ketut, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri dan A.A.N.B. Dwirandra. 2016. Kemampuan alokasi belanja modal memoderasi Pengaruh kinerja keuangan daerah pada Indeks pembangunan manusia. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 21, No.1 Feb 2016 Hal. 71-81
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyanta.2016. Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Univ Jember. Vol 14 No. 1 Juni 2016 Hal.19-40
- Sumartini, Ni Komang Ayuk dan Murjana. 2015. Pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di provinsi bali. E-jurnal ekonomi pembangunan Universitas Udayana vol. 4, no. 4, april 2015 Hal.258-271
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.

- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. Akuntansi keuangan daerah berbasis akural untuk SKPD. Alfabeta. Bandung
- Tandiontong, Mathius. 2016. Kualitas audit dan pengukurannya. Alfabeta Bandung
- Tamawiwu, Julius, Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warongan. 2016. Pengaruh kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja modal untuk pelayanan publik (studi pada kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi utara). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL" Vol.7 No.2(2016) Hal. 103-124
- Taylor, S.E. 2006. *Health Psychology*. (6th. Ed), Singapore: Mc. Graw Hill Book Company.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian belanja modal. Accounting Analisis Journal 2 (1) (2013) Hal.45-51
- Weygant, Kimmel and Kieso. 2014. *Accounting principles 9th Edition*. WileyPLUS Wisconsin USA
- World Bank. 2013. *Public Expenditure Management Handbook*. The International Bank for Reconstruction and Development/ THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.